

SELUBUNG MAKNA BALIHO ELITE PARTAI POLITIK; PERSPEKTIF FILSAFAT BAHASA BIASA

Yusa' Farchan¹; Agisthia Lestari²

Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Sutomo, Serang, Banten

¹email : yusak.1982@gmail.com

Paper Accepted: 30 September 2022

Paper Reviewed: 1-10 Oktober 2022

Paper Edited: 11-19 Oktober 2022

Paper Approved: 20 Oktober 2022

ABSTRAK

Meskipun klimaks dari momentum politik masih akan berlangsung pada 2024 mendatang, namun di tahun kedua pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin atau tahun 2021, para elite politik telah memanaskan mesin dan suhu politik. Indikator yang paling nyata dari kecenderungan tersebut adalah maraknya pemasangan baliho elite partai politik di berbagai daerah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis selubung makna atas teks-teks baliho elite parpol dari perspektif Filsafat Bahasa Biasa, serta mengungkap relasi antara baliho elite parpol dengan konsepsi ruang publik yang ideal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus yaitu baliho-baliho politik yang beredar sepanjang tahun 2021 di Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Dari hasil penelitian ditemukan beberapa hal. *Pertama*, dengan menggunakan pendekatan Filsafat Bahasa Biasa, meskipun mayoritas kalimat atau teks yang ada dalam baliho elite parpol tersebut tidak menyebut secara spesifik agenda kepentingan politiknya, namun keberadaan baliho elite parpol tersebut tetap merefleksikan suatu agenda atau kepentingan politik tertentu, yaitu kepentingan pemenangan pemilu 2024. *Kedua*, keberadaan baliho elite parpol di tahun pandemi merefleksikan etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Perilaku elite parpol yang memasang baliho secara massif di musim pandemi covid-19, jelas merefleksikan perilaku elite yang tidak sensitif krisis karena lebih mengutamakan agenda-agenda politiknya daripada mencari terobosan penting terhadap upaya pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi covid-19. *Ketiga*, dengan menggunakan perspektif teori Habermas, korporasi-korporasi besar, pemerintah dan pemilik modal termasuk para elite parpol berkantong tebal cenderung menguasai ruang publik secara hegemonik. Kondisi ini tentu jauh dari prasyarat ruang publik ideal yang mampu menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Ruang publik yang otonom untuk *civic-participation* merupakan elemen fundamental demokrasi. Oleh karena itu, sudah selayaknya jika ruang publik yang tersedia bersifat netral dan tidak diskriminatif dalam rangka membangun partisipasi politik yang lebih luas.

Kata Kunci: Baliho politik; Ruang Publik; Filsafat Bahasa Biasa

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Secara konstitusional, siklus pergantian kepemimpinan politik mendapatkan basis legitimasinya pada Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Pasal tersebut mengatur pelaksanaan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Artinya, sejak pemilu terakhir tahun

2019, momentum 2024 adalah tahun politik di mana akan berlangsung pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD).

Selain itu, sesuai UU No 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangan

Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU (UU Pilkada), di tahun 2024 juga akan diselenggarakan pemilu kepala daerah (pilkada) secara serentak.

Meskipun klimaks dari momentum politik masih berlangsung pada 2024 mendatang, namun di tahun kedua pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin atau tahun 2021, para elite politik telah memanaskan mesin dan suhu politik tanah air. Indikator yang paling nyata dari kecenderungan tersebut adalah maraknya pemasangan baliho elite partai politik di berbagai daerah di Indonesia.

Sepanjang tahun 2021, setidaknya tercatat lima elite partai politik yang secara massif menggunakan baliho sebagai sarana komunikasi politik. Berdasarkan identifikasi penulis di sejumlah daerah, beberapa elite partai politik yang memasang baliho tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum DPP Partai Demokrat, teks baliho “SEKARANG DAN MASA DEPAN”
- 2) Muhammin Iskandar, Ketua Umum DPP PKB, teks baliho “Padamu Negeri, Kami Berbakti; Gus Muhammin 2024”
- 3) Puan Maharani, Ketua DPP PDIP, teks baliho “Kepak Sayap Kebhinnekaan, Puan Maharani, Ketua DPR RI”
- 4) Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar, teks baliho “Kerja untuk Indonesia, Airlangga Hartarto 2024”
- 5) Giring Ganesha Djumaryo, Ketua Umum DPP PSI, teks baliho “Giring untuk Presiden 2024”.

Meskipun terdapat sejumlah variasi terkait penambahan kata atau identitas pemasang pada baliho-baliho elite parpol tersebut, tetapi secara umum, baliho-baliho yang dipasang di berbagai daerah tersebut tampak telah tersandarisasi desainnya, mengikuti garis komando struktural partai masing-masing.

Indikator lain atas memanasnya suhu politik di tahun 2021 adalah munculnya

berbagai relawan calon Presiden di berbagai daerah. Relawan tersebut secara terbuka menyatakan dukungannya kepada calon-calon Presiden yang dianggap layak memimpin bangsa ke depan. Relawan-relawan tersebut antara lain; Ganjar Pranowo Presiden (GPP), ANIES (Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera), Relawan Kawan Sandi (RKS), Rekat Indonesia (Relawan Ridwan Kamil), Relawan Puan Maharani (RPM) For Presiden 2024, Sahabat Airlangga, Poros Prabowo-Puan, dan lain sebagainya.

Terkait dengan baliho elite parpol, meskipun secara umum teks-teks yang ada pada baliho tersebut tidak secara eksplisit berkaitan dengan pencalonan mereka sebagai Presiden-Wakil Presiden 2024, namun pemasangan baliho-baliho tersebut tetap menyita perhatian publik karena dianggap bermuatan politis, apalagi di tengah pandemi covid-19 yang mengguncang perekonomian nasional.

Perlu dicatat bahwa tahapan pemilu 2024 sebenarnya secara formal administratif baru dimulai pada pertengahan tahun 2022. Hal ini merujuk pada Pasal 167 ayat (6) UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di mana tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat 20 (*dua puluh*) bulan sebelum hari pemungutan suara. Tahapan Penyelenggaraan Pemilu tersebut meliputi: a. perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu; b. pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih; c. pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu; d. penetapan Peserta Pemilu; e. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan; f. pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; g. masa Kampanye Pemilu; h. Masa Tenang; i. pemungutan dan penghitungan suara; j. penetapan hasil Pemilu; dan k. pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Terkait pemungutan suara Pemilu serentak, sebelumnya terjadi perdebatan di mana KPU mengusulkan tanggal 21 Februari 2024, sementara pemerintah

mengusulkan tanggal 15 Mei 2024. Atas perbedaan usulan tersebut, pemungutan dan penghitungan suara kemudian ditetapkan Rabu, 14 Februari 2024 berdasarkan kesepakatan bersama Komisi II DPR, pemerintah dan KPU RI.

Adapun untuk Pilkada serentak ditetapkan pada 27 November 2024. Dengan demikian, dengan mengacu pasal 167 ayat (6) UU 7/2017, maka Juni 2022 adalah jadwal tahapan pertama pemilu. Artinya, tahapan pertama pemilu berlangsung di tahun 2022, bukan tahun 2021.

Identifikasi Masalah

Maraknya pemasangan baliho elite partai politik di tahun pandemi, memunculkan respon publik yang beragam. Meski demikian, secara umum respon publik menyatakan kekecewaannya atas perilaku elite parpol tersebut karena dianggap tidak sensitif terhadap krisis. Berdasarkan survei Badan Litbang Kompas, 18-20 Agustus 2021 terkait respon masyarakat terhadap upaya kampanye politik untuk Pemilu 2024 di tengah pandemi Corona, 68 persen menilai kampanye dengan baliho tidak mempengaruhi pilihan saat pemilu (Detik.com, 2021).

Massifnya pemasangan baliho merefleksikan sikap elite parpol yang menganggap bahwa tidak ada yang keliru dengan pemasangan baliho-baliho tersebut. Sejumlah elite parpol-pun menegaskan pembelaannya terhadap keberadaan baliho-baliho tersebut. Politikus PDIP, Hendrawan Supratikno, menjelaskan pembelaannya bahwa dalam politik berlaku prinsip 'one step at a time'. Anggota Fraksi PDIP DPR RI ini mengatakan, *"Jangan terburu-buru bicara kontestasi 2024. Nikmati prosesnya, ikuti dinamika dan dialektikanya. Prinsip Protagoras kita ikuti, 'kalan kondisi berubah, kita juga harus berubah'. Prinsip Baruch Spinoza juga kita camkan, 'ikuti spiritualitas alam semesta dan kosmos kebatinan masyarakat'. Haste makes waste!"* (Republika; 2021).

Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar, Maman Abdurahman, menjelaskan, agenda pemasangan billboard merupakan

agenda rutin bidang media dan penggalangan opini DPP Partai Golkar yang dikomandani oleh Nurul Arifin di tahun 2021. Ia menegaskan bahwa pemasangan baliho memang sudah diagendakan di tahun 2021 dan sudah direncanakan jauh hari sebelum covid (Republika; 2021). Ia berusaha meyakinkan publik bahwa Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto bersama seluruh jajaran Partai Golkar bersama-sama dengan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten berjibaku bahu membahu mengatasi pandemi.

Dalam konteks pemasangan baliho, elite-elite parpol bisa saja berargumentasi bahwa baliho mereka bukanlah baliho politik yang memuat pesan politik tertentu khususnya berkaitan dengan pencapresan (*candidacy*). Para elite parpol tersebut boleh saja menyatakan bahwa baliho tersebut justru diperlukan agar publik tahu akan kinerja mereka di pemerintahan. Bisa saja elite parpol mengelak bahwa pemasangan baliho tersebut adalah untuk sosialisasi kinerja, bukan sosialisasi calon presiden. Namun demikian, masyarakat tetap berhak menaruh "kecurigaan" atas massifnya baliho-baliho tersebut.

Sebagaimana cara pandang filsafat bahasa biasa, teks-teks yang ada dalam baliho tentu tidak bisa kita maknai secara literal *an sich*, melainkan harus dibongkar secara mendalam terkait selubung makna yang melingkupinya. Teks-teks yang ada dalam baliho elite parpol tentu tidak berdiri sendiri, melainkan bertalian dengan agenda dan kepentingan politik tertentu. Dalam konteks ini, teks-teks atau bahasa yang terdapat dalam baliho tersebut tidak bisa kita lihat dengan cara pandang strukturalis atau tekstual; semata-mata berdasarkan apa yang tertera dalam baliho tersebut.

Rumusan Masalah

Teks-teks yang ada dalam baliho tersebut harus dibaca secara kritis terutama oleh masyarakat politik (*political society*) agar bisa mengungkap makna yang sebenarnya dari keberadaan baliho-baliho tersebut. Atas dasar itulah, kajian ini dilakukan untuk menjawab dua permasalahan pokok yaitu :

- 1) Bagaimana konstruksi atau selubung makna teks-teks baliho

- elite parpol tersebut dari perspektif Filsafat Bahasa Biasa?
- 2) Bagaimana relasi antara baliho elite parpol dengan konsepsi ruang publik yang ideal?

Tujuan Penelitian

Tujuan yang dingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Membongkar konstruksi atau selubung makna atas teks-teks baliho elite parpol dengan sudut pandang filsafat bahasa biasa
- 2) Mengetahui relasi antara baliho elite parpol dengan etika berbangsa dan bernegara di tengah situasi pandemi berdasarkan perspektif analisis tindak tutur komunikasi
- 3) Memahami relasi antara baliho elite parpol dengan konsepsi ruang publik yang ideal di tengah kooptasi ruang publik oleh negara, pasar dan pemilik modal.

Signifikansi Penelitian

Pada umumnya, penelitian tentang baliho politik lebih banyak menggunakan perspektif marketing politik. Dengan kata lain, sudut pandang yang digunakan umumnya adalah bagaimana keberadaan baliho politik tersebut dihubungkan dengan tujuan promosi kandidat dalam suatu arena atau momentum pertarungan politik tertentu (*lihat penelitian Andu, Christine Purnamasari dan Hardiyanti, Sartika Dwi; 2019; Firdaus; 2013*). Meskipun penelitian sebelumnya dari G. Putu Satya Amarta Dewi (2021) juga mengkaji baliho partai politik dari perspektif ilmu bahasa, tetapi titik tekannya ada pada kajian semiotika sosial.

Oleh karena itu, penelitian ini menemukan signifikansinya ketika menghadirkan perspektif lain yaitu berusaha membongkar konstruksi makna atas baliho-baliho elite parpol tersebut dengan sudut pandang filsafat bahasa biasa atau bahasa sehari-hari yang digunakan oleh masyarakat. Selain itu, urgensi dari penelitian ini terletak pada penggunaan perspektif teori lainnya yaitu teori ruang publik sehingga terdapat perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya

yang lebih banyak bertumpu pada perspektif teori marketing politik.

TINJAUAN PUSTAKA

Filsafat Bahasa Biasa

Dalam membongkar narasi atau selubung makna atas teks-teks baliho elite parpol tersebut, akan digunakan pendekatan filsafat bahasa biasa. Teks-teks yang ada di dalam baliho tersebut, akan dikaji berdasarkan sudut pandang filsafat bahasa biasa agar terungkap makna-makna yang sesungguhnya. Konstruksi makna atas teks-teks yang berada dalam baliho tersebut tentu tidak berdiri sendiri melainkan bertalian dengan agenda besar yang ada di belakangnya.

Secara historis, filsafat bahasa biasa merupakan salah satu dari tiga aliran utama penopang filsafat Bahasa, yang lahir di Inggris pada awal abad ke-20. Kedua aliran penopang lainnya adalah Atomisme Logik dan Postivisme Logik. Menurut Wibowo (2018; 11), aliran filsafat bahasa biasa dicetuskan oleh Ludwig Wittgenstein (1889-1951), guru besar filsafat bahasa Universitas Cambridge, dan diteruskan oleh para dosen di Universitas Oxford, terutama Gilbert Ryle (1900-1976), John Langshaw Austin (1911-1960), dan Peter Frederick Strawson (1919-2006). Ketiga "murid" Wittgenstein ini adalah dosen filsafat di Universitas Oxford, namun kemudian masing-masing memiliki perbedaan minat.

Ryle dan Strawson dikenal sebagai guru besar filsafat metafisika, sedangkan Austin lebih dikenal sebagai guru besar filsafat Bahasa. Itulah sebabnya, sering dikatakan orang bahwa tokoh aliran Filsafat Bahasa Biasa hanyalah Wittgenstein dan Austin.

Sejauh ini, aliran filsafat bahasa biasa dikenal memiliki bentuk yang lebih kuat, karena yang menjadi objek perhatiannya adalah bahasa biasa atau bahasa yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat. Tidak mengherankan jika pada pertengahan abad ke-20, filsafat bahasa biasa menjadi aliran yang paling fenomenal di Eropa dan Amerika Serikat. Menurut Wibowo (2018; 21), aliran Filsafat Bahasa Biasa tampak melakukan penentangannya terhadap prinsip linguistik struktural yang

mendasarkan dirinya pada epistemologi kaum Saussurian (*para pengikut Saussure*). Hal ini bisa dipahami dari prinsip aliran Filsafat Bahasa Biasa yang justru menekankan bahwa bahasa sehari-hari (*bahasa biasa*) amat terkonteks dengan masyarakat-masyarakat penggunanya.

Perbedaan sudut pandang yang digunakan oleh Saussure dan Wittgenstein dapat ditelusuri di mana Saussure berpijak pada pemikiran linguistik yang diwarnai dengan semangat positivistik-strukturalisme, sementara Wittgenstein berangkat dari pemikiran filsafat dengan penekanan pada penggunaan bahasa sehari-hari.

Logosentrisme yang disebutkan mewarnai pemikiran aliran Filsafat Bahasa Biasa menegaskan bahwa aliran ini lebih memusatkan diri pada bahasa sehari-hari (*bahasa biasa*) sebagai pantulan etika dan logika. Patut digarisbawahi, logosentrisme itu sendiri sebenarnya sedang digandrungi oleh pelbagai aliran pemikiran lain yang sezaman dengan aliran filsafat bahasa biasa, seperti neokantianisme, neomarxisme, strukturalisme, pragmatisme, fenomenologi, dan eksistensialisme. Akan tetapi, melihat fokusnya pada penggunaan bahasa sehari-hari (*bahasa biasa*), pemikiran aliran Filsafat Bahasa lantas menjadi fenomenal karena digunakan pula oleh pelbagai ilmu lain sebagaimana dilakukan oleh John Wisdom di Amerika Serikat ketika mengembangkan psikoanalisis, yaitu disiplin dalam psikologi yang dilahirkan Sigmund Freud.

Semangat logosentrisme yang mengurapi pemikiran awal abad ke-20, selain memunculkan nama Wittgenstein di Inggris sebagai pencetus aliran Filsafat Bahasa Biasa, juga mengharumkan nama Ferdinand de Saussure di Swiss sebagai pencetus aliran linguistik struktural.

Prinsip linguistik struktural, yang menjadi “nada dasar” epistemologi kaum Saussurian (*para pengikut Saussure*), kemudian ditentang secara tidak langung oleh aliran Filsafat Bahasa Biasa. Pasalnya, sebagaimana telah disinggung, prinsip aliran Filsafat Bahasa Biasa justru menekankan bahwa bahasa sehari-hari (*bahasa biasa*) amat terkonteks dengan

masyarakat-masyarakat penggunanya. Secara ontologis, kedua aliran ini memang tidak dapat dipertentangkan, karena saling berbeda pijakan. Alhasil, kita hanya dapat memakluminya secara epistemologis bahwa kedua aliran ini mengindikasikan pertentangan tajamnya.

Lalu, mengapa tadi dikatakan aliran linguistik struktural mendapat tentang “secara tidak langsung” dari aliran Filsafat Bahasa Biasa?. Hal ini terkait dengan perbedaan kacamata yang digunakan oleh Saussure dan Wittgenstein. Sebagaimana sudah dijelaskan, Saussure berpijak dari pemikiran linguistik yang diurapi semangat positivistik-strukturalisme, sementara itu Wittgenstein berangkat dari pemikiran filsafat dengan menggarisbawahi penggunaan bahasa sehari-hari.

Teori Ruang Publik

Untuk menjawab permasalahan kedua, terkait relasi antara baliho dengan konsepsi ruang publik yang ideal, akan digunakan teori ruang publik dari Jurgen Habermas. Patut dicatat bahwa sejarah filsafat kontemporer sepanjang abad ke-20 hingga kini menunjukkan bahwa filsafat bahasa biasa juga mengilhami pemikiran kritis tentang hakikat dan peranan bahasa termasuk mempengaruhi pemikiran-pemikiran kritis Habermas (1971).

Sebagai anggota generasi kedua mazhab Frankfurt, Habermas telah mengembangkan dasar yang telah ditentukan Plato, Aristoteles, Newton, Kant, dan Copernicus dalam tiga ranah ilmu pengetahuan, yaitu empiris-analitis; historis-hermeneutis dan ilmu pengetahuan reflektif. Pemikiran Habermas sesungguhnya tidak hanya mencakup filsafat ilmu namun juga mencakup filsafat komunikasi melalui pemikiran-pemikiran kritisnya.

Sebagai sebuah konsep, ruang publik yang diperkenalkan Habermas merupakan diskursus yang memungkinkan debat-debat dan pengemukaan pendapat terjadi dalam kondisi kesetaraan. Habermas menggambarkan bahwa ruang ini meliputi infrastruktur nyata dan norma-norma yang mendukung dan memungkinkan kritik-kritik politik diperbincangkan. Panduannya adalah argumentasi rasional dan diskusi

kritis yang menjadikan kekuatan argumen menjadi lebih penting dibandingkan identitas si pembicara (Habermas, 2007).

Konsep Habermas tentang ruang publik terdapat dalam karyanya *Strukturwandel der Öffentlichkeit; Untersuchungen Zu Einer Kategorie Der Bürgerlichen Gesellschaft* (Perubahan Struktural Ruang Publik; Sebuah Kajian Tentang Kategori Masyarakat Yang Borjuis). Habermas menyelidiki ruang publik yang dimulai dari era pencerahan Eropa. Bagi Habermas, ruang publik adalah suatu ruang yang menjembatani antara negara dengan masyarakat sipil. Ruang ini adalah ruang universal, di mana orang-orang berkumpul untuk mendiskusikan apa saja yang perlu didikusikan.(Habermas, terj, 2010; hal.3).

Ruang publik terbentuk seiring dengan munculnya kapitalisme-uang dan kapitalisme-niaga awal (*early finance and trade capitalism*), di mana saudagar-saudagar membutuhkan pertukaran informasi dan berita-berita yang dipublikasikan. Habermas menyatakan bahwa ruang publik terbentuk pada kelompok-kelompok borjuis di arena-arena pertemuan di antara mereka, seperti klub-klub atau salon-salon pada masa itu. Dalam ruang publik, di mana deliberasi dalam pertukaran argumentasi sangat dipentingkan, terbentuklah apa yang disebutnya sebagai opini publik.

Lebih lanjut menurut Habermas, di dalam model liberal ruang publik, media massa memainkan peranan penting dalam menginformasikan dan memandu opini publik, terutama sejak masyarakat secara simultan mulai menghilangkan batas-batas gender/kelas/ras namun justru menjadikan komunikasi secara langsung di antara para konstituen menjadi sulit. Tapi di lain sisi, komersialisasi media massa, menjadikan ruang publik sebagai area retorika dan misi-misi public relations dan periklanan yang justru diprioritaskan. Kepentingan komersial, kapitalisasi ekonomi, dan mainstream media berisikan ruang publik penuh kompromi serta wacana publik yang terkolonisasikan, dengan televisi sebagai garda terdepan (Habermas dalam Papacharissi, 2010, p. 116).

Sebagai produk budaya massa, baliho politik kerap melekat dan menjadi ciri penting komunitas elite politik untuk menyampaikan pesan politiknya kepada masyarakat. Dalam konteks baliho sebagai instrumen komunikasi elite dengan massa, ide dasar mengenai komunikasi sesungguhnya sangat sederhana. Menurut Habermas, ketika mengatakan sesuatu dalam konteks kehidupan sehari-hari, pembicara merujuk tidak hanya pada sesuatu di dunia obyektif (secara keseluruhan atau mungkin sebuah kasus), tetapi juga sesuatu di dunia sosial (sebagai keseluruhan dari hubungan interpersonal yang terlegitimasi) dan pada sesuatu yang dimiliki di dunia pembicara (*sebagai keseluruhan pengalaman yang dapat dimanifestasikan dan memiliki akses atas hak istimewa*).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Saryono (2010), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.

Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti. Pada penelitian kualitatif, semakin mendalam, teliti, dan tergali suatu data yang didapatkan, maka bisa diartikan pula bahwa semakin baik kualitas penelitian tersebut.

Beberapa poin penting yang perlu dipahami oleh seorang peneliti dalam melakukan penelitian kualitatif adalah :

1. Penelitian kualitatif tidak terlalu fokus kepada angka atau nilai dalam pengukuran variabelnya.
2. Penelitian kualitatif tidak melakukan suatu pengujian menggunakan metode statistik
3. Bersifat elaborasi, artinya peneliti diperbolehkan menggali informasi

- lebih dalam terhadap objek penelitian dengan tidak bergantung pada pengukuran numerik.
- Lebih tidak terstruktur disbanding penelitian kuantitaif.

Penelitian dengan pendekatan kualitatif setidaknya dapat dibedakan menjadi lima tipe utama, yaitu: phenomenology, ethnography, case study research, grounded theory, dan historical research. Dalam konteks penelitian ini, akan digunakan *case study research*, yaitu; *a form of qualitative research that focused on providing a detailed account of one or more cases*.

Penelitian studi kasus merupakan penelitian yang berfokus pada satu unit masalah atau obyek untuk menghasilkan deskripsi secara mendalam, kaya, luas dan menyeluruh. Studi kasus ini membahas mengenai karakteristik dari entitas khusus, fenomena, individu, atau masyarakat. Penelitian ini biasanya mencakup banyak sumber data yang telah dikumpulkan dalam kurun waktu tertentu.

Metode penelitian studi kasus meneliti suatu kasus atau fenomena tertentu yang ada di dalam masyarakat. Dalam hal ini, studi kasus yang diangkat adalah baliho elite partai politik yang terdapat di berbagai ruang publik sepanjang tahun 2021.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dokumentasi terhadap keberadaan baliho-baliho elite parpol di lima provinsi yaitu Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Dokumentasi juga dilakukan dengan penelaahan terhadap referensi-referensi yang berhubungan dengan faktor permasalahan penelitian. Dokumen yang dimaksud di antaranya adalah buku, artikel, jurnal, berita media massa dan referensi lain yang relevan. Sementara itu, analisis data dilakukan dengan menelaah seluruh data dari berbagai sumber. Setelah dibaca, dipelajari, dan ditelaah, langkah berikutnya adalah melakukan analisis dan penafsiran data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Selubung Makna Teks-Teks Baliho Elite Parpol; Perspektif Filsafat Bahasa Biasa

Dalam membongkar narasi atau selubung makna atas teks-teks baliho elite parpol tersebut, akan digunakan pendekatan Filsafat Bahasa Biasa. Teks-teks yang ada di dalam baliho tersebut, akan dikaji berdasarkan sudut pandang Filsafat Bahasa Biasa agar terungkap makna-makna yang sesungguhnya. Konstruksi makna atas teks-teks yang berada dalam baliho tersebut tentu tidak berdiri sendiri melainkan bertalian dengan agenda besar yang ada di belakangnya.

Secara historis, Filsafat Bahasa Biasa merupakan salah satu dari tiga aliran utama penopang filsafat Bahasa, yang lahir di Inggris pada awal abad ke-20. Kedua aliran penopang lainnya adalah Atomisme Logik dan Postivisme Logik. Menurut Wibowo (2018; 11), aliran Filsafat Bahasa Biasa dicetuskan oleh Ludwig Wittgenstein (1889-1951), guru besar filsafat bahasa Universitas Cambridge, dan diteruskan oleh para dosen di Universitas Oxford, terutama Gilbert Ryle (1900-1976), John Langshaw Austin (1911-1960), dan Peter Frederick Strawson (1919-2006). Ketiga "murid" Wittgenstein ini adalah dosen filsafat di Universitas Oxford, namun kemudian masing-masing memiliki perbedaan minat.

Prinsip utama aliran Filsafat Bahasa Biasa menekankan bahwa bahasa sehari-hari (*bahasa biasa*) amat terkonteks dengan masyarakat-masyarakat penggunanya. Dengan menggunakan perspektif Filsafat Bahasa Biasa, maka teks-teks yang ada dalam baliho elite parpol tentu tidak bisa kita maknai secara literal *an sich*, karena akan terhubung dengan masyarakat pembaca atau masyarakat awam sebagai bagian dari *political society*. Untuk itulah, teks-teks dalam baliho elite parpol tersebut perlu dibongkar secara mendalam terkait selubung makna yang melingkupinya.

Teks-teks yang ada dalam baliho elite parpol tentu tidak berdiri sendiri, melainkan berhubungan dengan agenda atau kepentingan politik tertentu. Dalam konteks ini, teks-teks atau bahasa yang

terdapat dalam baliho tersebut tidak bisa kita lihat dengan cara pandang strukturalis-teksual atau semata-mata berdasarkan apa yang tertera dalam baliho tersebut.

Berikut ini akan disajikan gambar beberapa baliho di beberapa kota di

Indonesia disertai dengan analisis tentang selubung makna baliho elite parpol berdasarkan perspektif Filsafat Bahasa Biasa.

Gambar 1. Baliho Agus Harimurti Yudhoyono
Di Kota Makassar, Sulawesi Selatan



Gambar 2. Baliho Muhamimin Iskandar
Di Kawasan Gunungsari, Surabaya, Jawa Timur



Gambar 3 Baliho Puan Maharani
Di Jalan Pemuda, Blora, Jawa Tengah



Gambar 4 Baliho Airlangga Hartarto
Di Kota Serang, Banten



Gambar 5 Baliho Giring Ganesha Djumaryo
Di Kawasan Kalimalang Raya, Jakarta Timur, DKI Jakarta



Terkait dengan baliho Agus Harimurti Yudhoyono, analisis akan diuraikan sebagai berikut. Pada 2021, muncul baliho Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum DPP Partai Demokrat di sejumlah daerah, antara lain di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Teks yang ada dalam baliho tersebut adalah "SEKARANG DAN MASA DEPAN; AHY Agus Harimurti Yudhoyono".

Kemunculan baliho AHY berukuran besar tersebut sempat menimbulkan kritik dari sejumlah kalangan, antara lain dari Abdillah Toha, politisi senior yang juga salah satu pendiri PAN. Dalam cuitannya di twitter @AT_AbdillahToha, ia mengkritik baliho tersebut dengan menulis "Halo Puan, Erlangga, Muhammin, AHY, apa tidak risih dan malu memajang gambar diri besar-besaran di sejumlah Indonesia bersaing untuk pilpres yang masih 3 tahun lagi, ketika rakyat sedang bergulat atas pandemi dan kehidupan sehari-

hari? Kenapa tak gunakan uang baliho itu untuk bantu rakyat saja?".

Atas kritik tersebut, Partai Demokrat kemudian memberikan tanggapannya. Kepala Bamkostra Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyatakan bahwa kritik tersebut salah alamat, namun ia tetap menghormati kritik Abdillah Toha tersebut. Menurut Herzaky, baliho AHY tidak didesain khusus untuk kepentingan pilpres 2024, tetapi untuk melawan kubu Moeldoko terkait konflik internal yang terjadi di Partai Demokrat. "Pertama, Ketum AHY tidak ada pasang-pasang baliho sejak lama. Kedua, baliho yang masih ada saat ini bukan karena pilpres, tapi karena melawan begal politik KSP-nya Bapak Presiden Joko Widodo, yaitu Moeldoko vs, yang mengaku-aku Ketum Partai Demokrat secara ilegal," ujar Herzaky sebagaimana diberitakan detikcom (5/8/2021).

Herzaky juga mengatakan, "dengan segala hormat, kami sangat mengapresiasi setiap

masukan dan kritikan yang masuk kepada kami. Tentunya setiap masukan dan kritik menjadi sumber inspirasi dan dorongan bagi kami untuk terus meningkatkan kontribusi kami dalam menyuarakan aspirasi dan memperjuangkan harapan rakyat," (detikcom, 5/8/2021).

Meskipun Partai Demokrat membantah bahwa keberadaan baliho-baliho AHY tersebut tidak berkaitan dengan kepentingan pilpres 2024, namun sulit membantah bahwa baliho-baliho tersebut ada kaitannya dengan pilpres 2024.

Secara literal, kata "masa depan" mencakup pengertian atau makna "periode waktu yang akan terjadi pasca pemasangan baliho". Artinya, tahun 2024 menjadi bagian dari lokus kata "masa depan" tersebut. Dengan menggunakan perspektif Filsafat Bahasa Biasa, kalangan awam atau masyarakat pembaca dengan mudah menafsirkan bahwa "masa depan" bisa berarti pilpres 2024. Hal ini dapat dijelaskan dengan argumentasi sebagai berikut.

Pertama, partai politik diberikan mandat oleh UUD 1945 sebagai instrumen atau saluran formal dalam proses rekrutmen kepemimpinan politik. Dengan demikian, keberadaan partai politik selalu bersenyawa dengan setiap momentum pemilihan umum baik itu pemilu atau pilkada. Meskipun tidak ada kata "partai" atau "Partai Demokrat" dalam baliho tersebut, namun mayoritas orang mengetahui bahwa Agus Harimurti Yudhoyono adalah representasi Partai Demokrat. Apalagi, dengan posisi AHY sebagai ketua umum, maka tanpa kata "partai" atau "partai politik", sulit untuk mengatakan bahwa baliho tersebut tidak berkaitan dengan keberadaan partai politik, dalam hal ini Partai Demokrat.

Kedua, Agus Harimurti Yudhoyono termasuk elite parpol yang sangat berkepentingan dengan arena pertarungan politik di pemilu 2024, baik dalam kapasitas dan kepentingannya sebagai Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden. Oleh karena itu, tanpa ada kata "pemilu 2024" atau "pilpres 2024", keberadaan baliho AHY tetap tidak bisa dilepaskan dari kepentingan AHY dalam pemilu 2024.

Masyarakat awam dengan mudah bisa melihat bahwa baliho AHY tetap berkaitan dengan agenda politik 2024.

Dari perspektif Filsafat Bahasa Biasa, keanekaragaman dalam hidup menyebabkan manusia membutuhkan bahasa, terutama untuk digunakan dalam berbagai konteks. Inilah prinsip utama aliran filsafat bahasa biasa mengenai hakikat bahasa sehari-hari dan keniscayaan tata permainan bahasa (*language-games*) di dalam kehidupan. Oleh karena itu, suatu ungkapan bahasa haruslah sesuai dengan tata permainan bahasanya, yang mencerminkan adanya (1) aturan, (2) nilai, dan (3) konteks masyarakat pengguna bahasa tersebut. (Wibowo; 59).

Kesadaran berbahasa dalam kaitan dengan konteks-konteks kehidupan, dengan demikian tidak dapat dilepaskan dari intelektualitas sehubungan dengan persoalan menafsirkan makna. Hal ini karena pada dasarnya masalah penggunaan bahasa tidak ditentukan lagi oleh struktur logisnya (sintaksis dan gramatikal), tetapi bagaimana penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari.

Terkait dengan baliho Muhammin Iskandar, analisis akan diuraikan sebagai berikut. Muhammin Iskandar (Cak Imin), merupakan tokoh politik yang sangat agresif menggunakan baliho sebagai sarana komunikasi politik. Sepanjang 2021, baliho Muhammin bertebaran di berbagai kota di Indonesia, termasuk di Kota Surabaya Jawa Timur. Teks yang ada dalam baliho tersebut adalah "Padamu Negeri, Kami Berbakti; Gus Muhammin 2024".

Dari sisi teks, yang paling menarik dan menyedot perhatian publik pembaca adalah kata "2024". Meskipun tidak didahului dengan kata pemilu atau pilpres, masyarakat pembaca termasuk kalangan awam dengan mudah bisa menafsirkan makna dibalik baliho tersebut. "2024" adalah tahun politik di mana berlangsung pemilihan umum serentak (pemilu presiden-wakil presiden dan pemilu legislatif) serta pemilu kepala daerah (pilkada).

Dengan menggunakan pendekatan Filsafat Bahasa Biasa, kalimat atau teks yang ada dalam baliho Muhammin tersebut tidak bisa dilepaskan dari konteks yang

melingkupinya. Konteks dalam kaitan ini bisa berupa ekosistem politik atau tahun politik yang sudah diatur siklusnya oleh Undang-undang setiap lima tahun sekali. Artinya, tanpa penjelasan kalimat tambahan apapun, kata “2024” sudah pasti merujuk pada tahun politik berlangsungnya pemilihan umum.

Perlu dicatat bahwa mengingat semua pemahaman manusia dilakukan lewat bahasa, maka menguasai bahasa akan menghasilkan gambar yang jauh lebih akurat tentang dunia. Pertanyaan-pertanyaan filosofis, dan juga pertanyaan akademis, menurut Wittgenstein harus dibingkai melalui diksi atau pilihan kata yang tepat, sehingga jika manusia dapat menemukan batas-batas bahasa, di sanalah manusia juga akan menemukan batas-batas dunia. Kesadaran berbahasa identik dengan bagaimana kita mampu memahami konteks-konteks bahasa dalam berkomunikasi sehari-hari. Dalam perspektif aliran Filsafat Bahasa Biasa, hal ini merujuk pada kenyataan bahwa pada dasarnya bahasa adalah tindakan manusia dan bahwa makna kata-kata dalam suatu ungkapan bahasa selalu berbeda dengan makna kata-kata dalam penggunaannya pada kehidupan manusia. Kata “2024” secara literal bisa mengandung makna yang beragam, bukan hanya pemilu 2024. Namun karena gambar yang ada dalam baliho adalah Sang Ketua Umum PKB, Muhammin Iskandar, maka kata “2024” tidak bisa dilepaskan dari konteks momentum pemilu 2024.

Terkait dengan baliho Puan Maharani, analisis akan diuraikan sebagai berikut. Puan Maharani juga termasuk tokoh politik yang menggunakan baliho sebagai medium komunikasi politik. Meskipun masih tampak “malu-malu”, baliho Puan Maharani secara massif muncul di berbagai daerah sepanjang tahun 2021 termasuk Kab. Blora, Jawa Tengah. Dalam baliho tersebut, tertulis teks “Kepak Sayap Kebhinnekaan, Puan Maharani, Ketua DPR RI”. Atribut atau identitas yang digunakan Puan adalah dalam kapasitas sebagai ketua DPR RI.

Secara tekstual, kalimat yang ada dalam baliho memang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pemilu

2024. Namun demikian, teks yang ada dalam baliho tersebut tetap tidak bisa dilepaskan dari konteks yang melingkupinya. Masyarakat pembaca mengenal dengan baik bahwa Puan Maharani adalah kader PDIP. Bukan hanya itu, Puan juga dikenal sebagai elite partai penerus trah Soekarno dan menjadi anak dari Megawati. Oleh karena itu, hadirnya baliho tersebut tetap tidak bisa dilepaskan dari konteks bahwa PDIP adalah partai yang berkepentingan terhadap momentum pemilu 2024. Apalagi, dari 9 parpol yang memiliki kursi di DPR RI, hanya PDIP yang bisa mengusung pasangan capres-cawapres tanpa koalisi karena memenuhi syarat *presidential threshold* sebesar 20 persen kursi DPR RI.

Hingga laporan penelitian ini ditulis, Puan Maharani lebih dinominasikan oleh internal PDIP sebagai Calon Presiden dibanding kader PDIP lainnya seperti Ganjar Pranowo. Namun demikian, problem utama Puan Maharani selama ini adalah elektabilitas yang cukup rendah dibanding para kompetitornya baik yang berasal dari PDIP maupun partai lain. Oleh karena itu, wajar jika muncul perspektif bahwa pemasangan baliho Puan adalah bagian dari cara PDIP untuk mengerek popularitas Puan. Jika popularitas naik, diharapkan elektabilitas juga ikut naik. Dengan demikian, baliho Puan Maharani bertalian dengan agenda PDIP pada momentum pemilu 2024.

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, suatu ungkapan bahasa haruslah sesuai dengan tata permainan bahasanya, yang menceriminkan adanya (1) aturan, (2) nilai, dan (3) konteks masyarakat pengguna bahasa tersebut (Wibowo; 59). Dalam hubungan ini, bahasa yang dimaksudkan bukanlah bahasa yang digunakan oleh pelbagai bangsa, seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab atau bahasa Mandarin, melainkan bahasa yang digunakan secara universal oleh masyarakat-masyarakatnya dalam pelbagai konteks kehidupan sehari-hari seperti bahasa ilmu, bahasa puisi, bahasa hukum, bahasa iklan, bahasa politik dan seterusnya.

Ketika menulis teks atau membuat gambar untuk kepentingan komunikasi

politik, tentu pembuat teks atau gambar tersebut akan fokus pada suatu nilai yang terikat pada konteks komunikasi politik itu sendiri. Oleh karena itu, istilah-istilah yang digunakan otomatis akan tunduk pada aturan-aturan tertentu yang hanya berlaku di dunia politik, seperti imaji masa depan, metafora terkait prestasi, dixi politik, dan lain sebagainya. Dengan demikian, merujuk pada Filsafat Bahasa Biasa, makna suatu kata pasti terkait dengan tempatnya dalam struktur grammaticalnya. Tempat dalam konteks ini dapat berupa komunitas politik, atau masyarakat politik yang berhubungan dengan agenda politik dalam suatu arena pemilihan (pemilu 2024). Jadi, sulit mengatakan bahwa baliho Puan Maharani tidak berhubungan dengan agenda pemilu 2024.

Terkait dengan baliho Airlangga Hartarto, analisis akan diuraikan sebagai berikut. Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto termasuk figur yang agresif menggunakan baliho sebagai sarana komunikasi politik. Pada medio 2021, baliho Airlangga bertebaran di berbagai daerah, seperti yang ada di Kota Serang, Banten. Dalam baliho tersebut, tertulis "Kerja untuk Indonesia, Airlangga Hartarto 2024".

Dalam baliho tersebut, memang tidak terdapat kata "pemilu" atau "pilpres" atau "capres" yang menandai adanya kepentingan politik tertentu. Secara literal, kalimat "Airlangga Hartarto 2024" bisa saja ditafsirkan beragam. Bisa saja tahun 2024 ada peristiwa penting selain pemilu yang diikuti Airlangga. Namun, sebagaimana perspektif Filsafat Bahasa Biasa, makna suatu kata pasti terkait dengan tempatnya dalam struktur grammaticalnya.

Apalagi, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengakui bahwa baliho Airlangga Hartarto yang dipampang di ruang publik merupakan bagian dari upaya sosialisasi calon presiden (Capres) 2024. Pemasangan itu, menurut Doli juga sudah diatur oleh DPP Partai Golkar. *"Awalnya atribut sosialisasi dilakukan secara sporadis oleh kader Golkar di daerah,"* kata Doli di Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu (11/8/2021).

Selain itu, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily juga membenarkan bahwa baliho tersebut dipasang dalam rangka sosialisasi Airlangga kepada publik untuk Pemilu 2024. Ia menerangkan, sosialisasi itu merupakan tindak lanjut hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Golkar pada Maret 2021. *"Sebetulnya sosialisasi Ketua Umum Partai Golkar kepada masyarakat ini merupakan hasil dari Rapimnas dan Rakernas Partai Golkar bulan Maret 2021 yang lalu,"* kata Ace sebagaimana diberitakan Kompas.com, (5/8/2021).

Dengan demikian, menjadi terang bahwa baliho Airlangga memang sengaja didesain untuk kepentingan pemilu 2024, apalagi Airlangga sejauh ini masih dihadapkan pada problem popularitas dan elektabilitas sebagai variabel penting pemenangan. Dengan menggunakan perspektif Filsafat Bahasa Biasa, kita menemukan bahwa sebuah kata memang bebas digunakan dalam konteks yang berbeda-beda, tergantung permainan bahasanya. Dalam suatu *political society*, penggunaan kata "2024" tentu berkaitan dengan agenda pemilihan umum.

Terkait dengan baliho Giring Ganesh Djumaryo, analisis akan diuraikan sebagai berikut. Giring Ganesh Djumaryo, Ketua Umum DPP PSI, juga menjadi tokoh politik yang sering menggunakan baliho besar sebagai sarana komunikasi politiknya. Sepanjang 2021, baliho Giring banyak tersebar di berbagai kota di Indonesia, termasuk DKI Jakarta. Dalam baliho tersebut, tertulis "Giring untuk Presiden 2024".

Secara literal, kalimat dalam baliho Giring tersebut dapat dicerna dengan mudah dan dipahami oleh siapapun pembacanya bahwa Giring berkepentingan menjadi Presiden 2024. Namun demikian, bagi sebagian kalangan terutama masyarakat yang literasi politiknya baik, muncul sejumlah pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan itu antara lain; apakah Giring mampu bersaing dengan tokoh-tokoh politik populer lainnya mengingat jam terbang politik Giring yang masih rendah?; apakah PSI sebagai partai tempat Giring berpolitik memiliki kursi di DPR RI sebagai syarat untuk mencalonkannya;

apakah Giring telah memiliki modal politik yang cukup sebagai Capres?; dan seterusnya.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut pada akhirnya memunculkan persepsi lain dari masyarakat pembaca di mana baliho Giring yang dipasang PSI semata-mata untuk kepentingan *gimmick* politik. Dengan kata lain, "Giring untuk Presiden 2024" tidak dimaksudkan sebenarnya untuk mendorong Giring maju sebagai Calon Presiden 2024. "Giring untuk Presiden 2024" juga tidak dimaksudkan bahwa Giring siap bertarung sebagai kandidat presiden 2024. "Giring untuk Presiden 2024" lebih dimaksudkan sebagai *gimmick* politik untuk mendongkrak popularitas partai nya yaitu PSI.

Baliho Politik dan Tindak Tutur Komunikasi Elite

Selain berkaitan dengan makna terselubung, keberadaan baliho elite parpol juga beririsan dengan etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini, etika kehidupan berbangsa dan bernegara berkaitan dengan tindak tutur komunikasi para pejabat publik, termasuk elite-elite partai politik di musim pandemi covid-19. Tindak tutur komunikasi lebih menggarisbawahi hubungan niat dan perilaku si pelaku komunikasi dengan isi pesan komunikasinya.

Menurut Wibowo (2018; 140), analisis tindak tutur komunikasi memfokuskan pada peran manusia-manusia yang sedang melakukan komunikasi, dalam wujud apapun, bertalian dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari perspektif aksiologis, analisis tindak tutur komunikasi mengarah pada upaya pembongkaran konspirasi ungkapan-ungkapan bahasa dibalik isi pesan komunikasi, apapun itu wujudnya.

Dengan menggunakan analisis tindak tutur komunikasi sebagai aliran Filsafat Bahasa Biasa, perilaku elite parpol yang memasang baliho secara massif di musim pandemi covid-19, jelas merefleksikan perilaku elite yang tidak sensitif krisis. Para elite parpol tampak lebih mengutamakan agenda-agenda politiknya daripada mencari terobosan penting terhadap agenda

pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi covid-19.

Miliaran rupiah yang dihabiskan oleh elite-elite politik untuk membuat baliho, akan jauh lebih bermanfaat jika bisa dikonversi menjadi program-program jaring pengaman sosial untuk masyarakat, terutama masyarakat korban pandemi covid-19.

Baliho Elite Parpol dan Konsepsi Ruang Publik Ideal

Untuk menjawab pertanyaan kedua terkait bagaimana relasi antara baliho elite parpol dengan konsepsi ruang publik yang ideal, akan digunakan teori ruang publik dari Jurgen Habermas. Sebagai sebuah konsep, ruang publik yang diperkenalkan Habermas merupakan diskursus yang memungkinkan debat-debat dan pengemukaan pendapat terjadi dalam kondisi kesetaraan.

Konsep Habermas tentang ruang publik terdapat dalam karyanya *Strukturwandel der Offentlichkeit; Untersuchungen Zu Einer Kategorie Der Bürgerlichen Gesellschaft* (Perubahan Struktural Ruang Publik; Sebuah Kajian Tentang Kategori Masyarakat Yang Borjuis). Habermas menyelidiki ruang publik yang dimulai dari era pencerahan Eropa. Bagi Habermas, ruang publik adalah suatu ruang yang menjembatani antara negara dengan masyarakat sipil. Ruang ini adalah ruang universal, di mana orang-orang berkumpul untuk mendiskusikan apa saja yang perlu didikusikan.(Habermas, terj, 2010; hal.3).

Secara teoritis, Habermas (1962) sebenarnya telah menyediakan basis teoritik yang komprehensif terkait prasyarat ruang publik yang ideal. Perlu dicatat bahwa perubahan struktural ruang publik di zaman modern saat ini ditandai oleh bangkitnya kapitalisme, industri kebudayaan, kekuatan korporasi termasuk pemilik modal dalam arena ruang publik. Ribuan baliho elite parpol yang menyerbu ruang publik secara tidak langsung menjadikan ruang publik sebagai arena kompetisi politik. Parade baliho politik tentu didesain dalam rangka membidik ceruk pasar elektoral dengan menstimulus orang untuk menjadi pemilih atau partisian.

Dalam perspektif teori Habermas, korporasi-korporasi besar, pemerintah dan pemilik modal termasuk para elite parpol berkantong tebal cenderung mengambil alih ruang publik, sementara warga negara cukup senang menjadi konsumen barang, jasa, atau administrasi politik. Dengan kata lain, warga negara hanya diletakkan dalam konteks sebagai konsumen atau partisian. Kondisi ini tentu mengebiri peran dan partisipasi politik warga negara di berbagai ruang publik yang tersedia.

Dalam perkembangannya saat ini, ruang publik bergeser menjadi arena pertarungan terbuka simbol-simbol dan identitas politik kelompok. Karena dukungan modal, kelas politik elite tampak mendominasi ruang-ruang publik tersebut. Akibatnya, terjadi hegemoni ruang publik oleh para elite politik elite. Ruang publik yang ideal adalah ruang publik yang mampu menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Perlu dicatat bahwa ruang publik yang otonom untuk *civic participation* merupakan elemen fundamental demokrasi. Oleh karena itu, sudah selayaknya jika ruang publik yang tersedia bersifat netral dan tidak diskriminatif dalam rangka membangun partisipasi politik yang lebih luas. Ruang publik harus jauh dari monopoli kekuatan politik dan modal.

Saat ini, ruang publik tampak kehilangan ruh publiknya dan berubah menjadi area privat yang dipublikkan. Harapan akan tumbuhnya partisipasi politik warga negara yang lebih luas dipatahkan oleh kenyataan bahwa ruang publik telah dimonopoli dan didesain untuk melayani kepentingan elite (Farchan; 2021).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pada dasarnya, bahasa adalah tindakan manusia. Makna kata-kata dalam suatu ungkapan bahasa selalu berbeda dengan makna kata-kata dalam penggunaannya pada kehidupan manusia. Bahasa sehari-hari pada hakikatnya berkelindan dengan konteks-konteks dan nilai-nilai kehidupan yang wujudnya dapat kita lihat melalui berbagai bentuk tata permainan bahasa.

Aliran Filsafat Bahasa Biasa yang memfokuskan objek materialnya pada bahasa sehari-hari (bahasa biasa) dapat digunakan untuk membongkar makna terselubung dari membanjirnya baliho elite parpol di musim pandemi covid-19.

Dengan menggunakan pendekatan Filsafat Bahasa Biasa, kalimat atau teks yang ada dalam baliho para elite parpol, tidak bisa dilepaskan dari konteks yang melingkapinya. Konteks dalam kaitan ini bisa beragam, namun umumnya merujuk pada setting atau latar politik yaitu tahun politik 2024, tahun berlangsungnya pemilu serentak dan pilkada serentak. Artinya, meskipun mayoritas kalimat atau teks yang ada dalam baliho elite parpol tersebut tidak menyebut secara spesifik agenda kepentingan politiknya, namun keberadaan baliho elite parpol tersebut tetap merefleksikan suatu agenda atau kepentingan politik tertentu, yaitu kepentingan pemenangan pemilu 2024.

Selain berkaitan dengan makna terselubung, keberadaan baliho elite parpol juga beririsan dengan etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini, etika kehidupan berbangsa dan bernegara berkaitan dengan tindak tutur komunikasi para pejabat publik, termasuk elite-elite partai politik di musim pandemi covid-19.

Dengan menggunakan analisis tindak tutur komunikasi sebagai aliran Filsafat Bahasa Biasa, perilaku elite parpol yang memasang baliho secara massif di musim pandemi covid-19, jelas merefleksikan perilaku elite yang tidak sensitif krisis. Para elite parpol tampak lebih mengutamakan agenda-agenda politiknya daripada mencari alternatif atau terobosan penting terhadap upaya pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi covid-19.

Kesadaran etis yang menjadi roh dari aliran Filsafat Bahasa Biasa, sebenarnya akan menuntun perilaku elite dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui pendekatan tindak tutur komunikasi, proses penyajian sebuah wacana, apapun bentuknya, mesti dilandasi oleh nilai-nilai luhur bangsa. Musim pandemi covid-19 adalah kondisi di mana bangsa sedang “berduka” akibat guncangan ekonomi dan kesehatan yang dampaknya meluas ke semua dimensi

kehidupan. Dalam kondisi demikian, sudah selayaknya jika para elite parpol tidak mengutamakan agenda dan kepentingan politiknya melalui pemasangan baliho secara massif di tengah duka mendalam seluruh anak bangsa akibat pandemi.

Saran

Saran yang bisa diberikan atas penelitian ini antara lain:

1. Perlu adanya pengaturan kampanye yang lebih spesifik dan komprehensif di UU Pemilu terkait pemasangan baliho
2. Perlu pengaturan penggunaan ruang publik berdasarkan azas keadilan agar tidak terjadi monopoli ruang publik baik oleh korporasi, negara dan para pemilik modal termasuk para elite parpol berkantong tebal.
3. Perlu adanya kesadaran etik para pejabat publik dalam kondisi krisis dengan lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok

DAFTAR PUSTAKA

- Andu, Christine Purnamasari dan Hardiyanti, Sartika Dwi. (2019). *Pengaruh Baliho Terhadap Pilihan Politik Masyarakat Kelas Menengah Pada Pilkada Di Kota Makassar*. Jurnal Representamen 5 (2).
- Detikcom. (2021). *Survei Litbang Kompas: Baliho Politik Dianggap Nggak Ngaruh!* Diakses tanggal 19 November 2021 dari: <https://news.detik.com/berita/d-5692372/survei-litbang-kompas-baliho-politik-dianggap-nggak-ngaruh> Faisal, Sanipah. (1990). Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi. Malang: YA3 Malang.
- Detikcom. (2021). *Baliho AHY Kena Sentil Abdillah Toba, Demokrat: Salah Alamat*. Diakses tanggal 28 Desember 2021 dari: <https://news.detik.com/berita/d-5692372/survei-litbang-kompas-baliho-politik-dianggap-nggak-ngaruh>
- Dewi, G. Putu Satya Amarta. (2021). *Bahasa Propaganda Baliho Partai Politik Nasionalis Pemilu 2019: Analisis Semiotika Sosial*. Jurnal KIBASP (Kajian Bahasa, Sastra dan Pengajaran) 4 (2). DOI : <https://doi.org/10.31539/kibasp.v4i2.1963>
- Firdaus (2013). *Parade Iklan Politik Di Tabun Politik: Polarisasi Penggunaan Iklan Untuk Membangun Citra Menuju Pemilu 2014*. Turast: Jurnal Penelitian & Pengabdian 1 (1).
- Habermas, J. (2007). Modernity: An Unfinished Project (1980). In C. Calhoun, J. Gerteis, J. Moody, S. Pfaff, & I. Virk, *Contemporary Sociological Theory* (p. 360). Malden: Blackwell Publishing.
- Habermas, J. (2010). Ruang Publik, Sebuah Kajian Tentang Kategori Masyarakat Borjuis (terj.). Bantul: Kreasi Wacana
- Herdiansyah, Haris. (2010). Metodelogi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial. Jakarta: Salemba Humanika.
- Kompas.com. (2021). *Resmi Dilantik Jadi Ketua Umum PSI 2019-2024, Giring Ganesha: Alhamdulillah*. Diakses tanggal 20 November 2021 dari: <https://nasional.kompas.com/read/2021/11/17/10152611/resmi-dilantik-jadi-ketua-umum-psi-2019-2024-giring-ganesha-alhamdulillah?page=all>
- Kompas.com. (2021). *Baliho Airlangga Marak Saat Pandemi Tuai Kritik, Golkar: Itu Hasil Rapimnas dan Rakernas*. Diakses tanggal 30 November 2021 dari: <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/05/11301201/baliho-airlangga-marak-saat-pandemi-tuai-kritik-golkar-itu-hasil-rapimnas>
- Republika. (2021). *Parpol Tanggapi Sentimen Negatif Pemasangan Baliho*. Diakses tanggal 19 November 2021 dari: <https://www.republika.co.id/berita/qxm7qp396/parpol-tanggapi-sentimen-negatif-pemasangan-baliho>
- Saryono. (2010). Metode Penelitian Kualitatif, PT. Alfabeta, Bandung
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,

- Kualitatif, dan R&D. Bandung:
Alfabeta
- Wibowo, Wahyu. (2018). Komunikasi
Kontekstual; Konstruksi Terapi-
- Praksis Aliran Filsafat Bahasa Biasa:
Jakarta, Bumi Aksara